



KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS

Provinsi Papua 2019-2023



KONTEN



02

Penerimaan Dana Otsus & Struktur Pendapatan Daerah Papua



03

Periodisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otsus Papua



04

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah



05

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Papua



01

Hak Khusus Keuangan Provinsi Papua Berdasarkan Undang-Undang



06

Rencana Program yang Dibiayai Dana Otsus Tahun 2019-2023 Berdasarkan RPJMD Papua

1

Hak Khusus Keuangan Provinsi Papua

Tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus

NO	POS PENERIMAAN	KEBIJAKAN	
		UU 33 /2004	UU 21/2001
1	Pajak bumi dan bangunan	90%	90%
2	BPHTB	80%	80%
3	Pajak penghasilan orang pribadi	20%	20%
4	Kehutanan		
	a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan	80%	80%
	b. Dana Reboisasi	40%	80%
5	Perikanan	80% utk kab/kota	80%
6	Pertambangan Umum	80%	80%
7	Pertambangan Panas Bumi	80%	-
8	Pertambangan Minyak Bumi	15,5%	70% selama tahun 1 s/d tahun 25, dan menjadi 50% untuk tahun ke 26 dan seterusnya
9	Pertambangan Gas Bumi/Alam	30,5%	70% selama tahun 1 s/d tahun 25, dan menjadi 50% untuk tahun ke 26 dan seterusnya
10	Penerimaan khusus dalam rangka Otsus	-	Setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional*
11	Dana tambahan dalam rangka Otsus	-	Ditetapkan antara Pemerintah dan DPR RI berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun**

Dalam bidang keuangan daerah, kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus berupa:



Pos Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 25 tahun, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan



Pos Dana Tambahan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur



2

Penerimaan Dana Otonomi Khusus & Struktur Pendapatan Daerah Papua

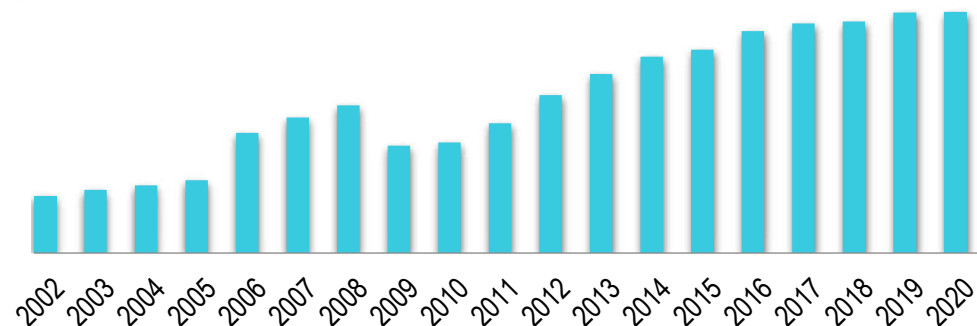


Penerimaan Dana Otsus Papua Tahun 2002-2020

Jumlah dana Otsus yang telah diterima Provinsi Papua mencapai **RP. 92,6 TRILYUN**, dengan 76% berupa dana Otsus Papua & 24% berupa dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus Papua

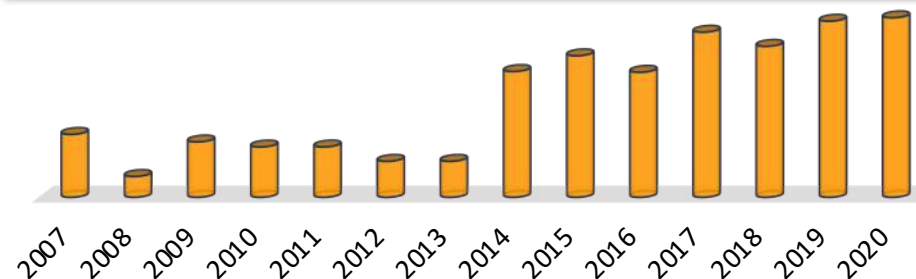
Tahun	Dana Otonomi Khusus (Rp)	Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus (Rp)	Total Transfer Dana Otonomi Khusus Papua (Rp)
TOTAL	70.816.137.035.550	21.869.330.944.000	92.685.467.979.550
2002	1.382.300.000.000	-	1.382.300.000.000
2003	1.539.560.000.000	-	1.539.560.000.000
2004	1.642.617.943.000	-	1.642.617.943.000
2005	1.775.312.000.000	-	1.775.312.000.000
2006	2.913.284.000.000	-	2.913.284.000.000
2007	3.295.748.000.000	1.000.000.000.000	4.295.748.000.000
2008	3.590.142.897.000	330.000.000.000	3.920.142.897.000
2009	2.609.796.098.000	880.000.000.000	3.489.796.098.000
2010	2.694.864.788.000	800.000.000.000	3.494.864.788.000
2011	3.157.459.547.550	800.000.000.000	3.957.459.547.550
2012	3.833.402.135.000	571.428.572.000	4.404.830.707.000
2013	4.355.950.048.000	571.428.572.000	4.927.378.620.000
2014	4.777.070.560.000	2.000.000.000.000	6.777.070.560.000
2015	4.940.429.880.000	2.250.000.000.000	7.190.429.880.000
2016	5.395.051.859.000	1.987.500.000.000	7.382.551.859.000
2017	5.580.152.407.000	2.625.000.000.000	8.205.152.407.000
2018	5.620.854.115.000	2.400.000.000.000	8.020.854.115.000
2019	5.850.230.158.000	2.800.000.000.000	8.650.230.158.000
2020	5.861.910.600.000	2.853.973.800.000	8.715.884.400.000

Perkembangan Penerimaan Dana Otsus



Penerimaan DOK mengalami peningkatan secara signifikan (rata-rata 9% /tahun) seiring dengan meningkatnya plafon DAU nasional.

Penerimaan Dana Tambahan Infrastruktur

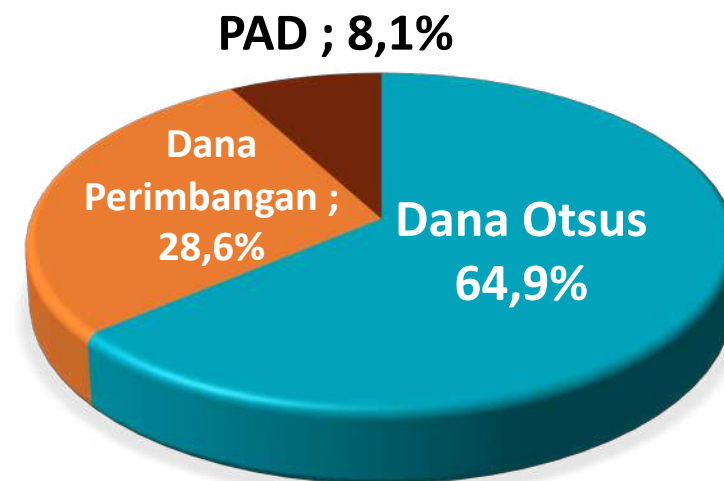


Penerimaan DTI mulai terealisasi tahun 2007, & secara kumulatif Pemerintah Provinsi Papua telah menerima DTI sebesar Rp.21,8 triliun (2007-2020)

Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua 2002-2020

TAHUN	APBD PAPUA (Rp.Juta)	PAD		Dana Perimbangan		DOK dan DTI	
		Rp.juta	%	Rp.juta	%	Rp.juta	%
2002	2.158.904	96.712	4,5	679.892	31,5	1.382.300	64,0
2003	2.498.927	117.857	4,7	841.510	33,7	1.539.560	61,6
2004	2.439.386	162.102	6,6	634.666	26,0	1.642.618	67,3
2005	2.673.993	198.627	7,4	700.054	26,2	1.775.312	66,4
2006	4.315.000	200.314	4,6	1.201.402	27,8	2.913.284	67,5
2007	5.371.967	345.420	6,4	730.799	13,6	4.295.748	80,0
2008	5.558.791	357.742	6,4	1.280.906	23,0	3.920.143	70,5
2009	5.322.085	345.398	6,5	1.486.891	27,9	3.489.796	65,6
2010	5.284.526	357.802	6,8	1.431.859	27,1	3.494.865	66,1
2011	5.447.829	378.701	7,0	1.111.669	20,4	3.957.460	72,6
2012	7.295.602	403.561	5,5	2.487.210	34,1	4.404.831	60,4
2013	8.184.736	407.694	5,0	2.849.664	34,8	4.927.379	60,2
2014	10.489.109	762.151	7,3	2.949.888	28,1	6.777.071	64,6
2015	11.357.407	876.587	7,7	3.290.389	29,0	7.190.430	63,3
2016	12.438.142	1.097.662	8,8	3.957.928	31,8	7.382.552	59,4
2017	13.968.877	1.308.281	9,4	4.455.444	31,9	8.205.152	58,7
2018	13.548.512	1.008.758	7,4	4.518.900	33,4	8.020.854	59,2
2019	13.978.118	938.055	6,7	4.389.832	31,4	8.650.230	61,9
2020	14.602.975	1.185.019	8,1	4.702.071	32,2	8.715.884	59,7

Rata-rata kontribusi DOK & DTI terhadap APBD mencapai 64,9% dari total pendapatan daerah





3

**Evaluasi Pengelolaan
& Pengalokasian Dana
Otonomi Khusus
Papua**



Periodesasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua



Periode



Porsi Kab/Kota



Porsi Provinsi



Dasar Hukum

2002-2003

40%

60%

SK Menteri Dalam Negeri No. 47/KM.07/2002 tentang tata cara penyaluran dana otonomi khusus Prov. Papua

2004-2006

60%

40%

Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang Pembagian Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

2007-2013

60%

40%

Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Penerimaan khusus Dalam Rangka Otsus Papua setiap tahun

2014-2020

80%

20%

- Peraturan Daerah Khusus Prov. Papua No. 25/2013 Tentang Pembagian Penerimaan & Pengelolaan Keuangan Dana Otsus
- Peraturan Daerah Khusus Prov. Papua No. 13 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Khusus Prov. Papua No. 4 Tahun 2019

Mandat Pengalokasian & Peruntukan Dana OTSUS Papua (2% DAU Nasional)

Berdasarkan Perdasus Papua 25/2013, Perdasus Papua 13/2016 dan Perdasus Papua 4/2019



Dana Otsus Pertama

dikurangi

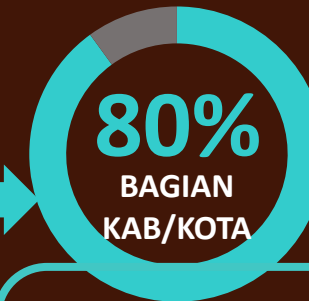
PROGRAM STRATEGIS Lintas Kab/Kota Urusan Bersama yang Diatur dengan Pergub

Pergub Papua No.3 / 2019 tentang Pengalokasian Dana OTSUS Kab./Kota Se Provinsi Papua TA 2019:

Pendidikan (Beasiswa Unggul Papua & lainnya)	Perlindungan Sosial (Bangga Papua)
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (KPS & RS)	
Ekonomi	Perumahan & Fasilitas Umum
Keagamaan	Perencanaan & Kelembagaan Khusus
PON XX (Pendidikan & Olahraga)	Pengalihan Kewenangan (SMU/SMK)



Dana Otsus setelah dikurangi belanja untuk program strategis bersama provinsi & kab/kota



- Program bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan & infrastruktur kewenangan Provinsi
- Bantuan untuk institusi keagamaan, lembaga masyarakat adat asli & yayasan pendidikan, kesehatan & ekonomi
- Penataan data
- Monev program
- Peningkatan kinerja keuangan
- Operasional pelaksanaan tugas & fungsi MRP

- Pendidikan Minimal 30 %
- Infrastruktur Minimal 20 %
- Kesehatan Minimal 15 %
- Bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat & kelompok perempuan maksimal 6%
- Ekonomi Kerakyatan Minimal 20%
- Perencanaan, Monev dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuda Pemda Maksimal 2 %
- Prioritas Lainnya Maksimal 2%

Mandat Pengelolaan Dana Tambahan Otonomi Khusus Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan Perdasus Papua 25/2013, Perdasus Papua 13/2016 dan Perdasus Papua 4/2019



Dana Tambahan
Dalam Rangka
Pelaksanaan
Otonomi Khusus

85%
BAGIAN
PROVINSI

60%



INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

(jalan, jembatan & infrastruktur perhubungan udara, laut/perairan, darat & angkutan sungai & penyeberangan)

40%



INFRASTRUKTUR LAINNYA

(pelayanan air bersih & sanitasi, listrik, telekomunikasi, sumber daya air, bangunan/gedung fasilitas umum seperti rumah sakit, pendidikan, sarana prasarana, olahraga, dll)

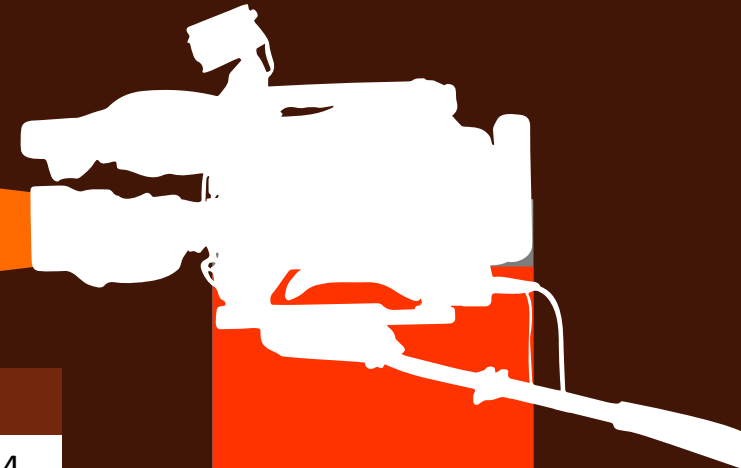
15%
BAGIAN
KAB/KOTA



INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

(jalan, jembatan & infrastruktur perhubungan udara, laut/perairan, darat & angkutan sungai & penyeberangan, yang menjadi kewenangan kab/kota untuk membuka akses sampai ke permukiman masyarakat)

ALOKASI DANA OTSUS Papua Tahun 2002-2006



URAIAN	2002	2003	2004	2005	2006
1. PROVINSI (Rp.Juta)	829.530	924.488	657.418	570.000	1.099.344
Persentase	60%	60%	40%	32%	38%
2. KABUPATEN/KOTA (Rp.Juta)	552.770	605.512	953.010	855.300	1.648.940
Persentase	40%	40%	60%	48%	57%
3. PROGRAM BERSAMA (PILKADA, MRP, PENDIDIKAN & KESEHATAN)	-	-	-	350.000	165.000
Persentase	-	-	-	20%	6%
TOTAL DANA OTSUS (Rp. Juta)	1.382.300	1.530.000	1.642.617	1.775.300	2.913.284



01 Dibawah kepemimpinan Gubernur Bapak Jacobus 'Jaap' Perviddya Solossa dan Wakil Gubernur Constant Karma

02 Alokasi dana otsus yang pada awalnya berpola 60 provinsi dan 40 kab/kota diubah menjadi sebaliknya 60 kab/kota & 40 provinsi

03 Mulai diterapkan program bersama provinsi & kab. yg menjadi pemotong dana otsus sebelum dibagikan antara provinsi & kab/kota

ALOKASI DANA OTSUS Papua Tahun 2007-2013

URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Program Strategis							
1 Daerah							
RESPEK/PROSPEK	411.400	433.000	320.000	320.000	457.000	457.550	515.594
Pendidikan Gratis	-	-	120.000	120.000	-	-	-
Kesehatan Gratis	-	-	60.000	60.000	-	-	-
2 Porsi Provinsi (Rp.Juta)	1.153.739	1.661.151	843.307	847.945	1.080.200	1.350.341	1.536.142
Persentase	35,0%	46,3%	32,3%	31,5%	34,2%	35,2%	35,3%
3 Porsi Kab/Kota (Rp.Jt)	1.730.608	1.928.980	1.265.874	1.298.710	1.620.000	2.025.511	2.304.213
Persentase	52,5%	53,7%	48,5%	48,2%	51,3%	52,8%	52,9%
TOTAL DANA OTSUS (Rp.Jt)	3.295.630	3.590.120	2.609.790	2.694.650	3.157.500	3.833.402	4.355.950

01

Tahun 2006-2012 dibawah kepemimpinan Gubernur Bapak Barnabas Suebu & Wakil Gubernur Alex Hasegem

02

Mulai diterapkan pengalokasian dana otus untuk Pembangunan kampung yang terwujud dalam RESPEK dan gerakan turun ke kampung (TURKAM)

03

Porsi Provinsi 40%, sedangkan porsi kab/kota 60%

2002-2006

2007-2013

2014-2020

ALOKASI DANA OTSUS Papua Tahun 2014-2020

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Program Strategis Daerah (Rp. Juta)	915.595	1.078.956	1.533.578	1.754.343	1.718.679	3.903.514	3.915.153
Persentase	19,2%	21,8%	28,4%	31,2%	30,8%	66,7%	66,8%
2 Porsi Provinsi (Rp. Juta)	772.295	772.295	772.295	772.295	772.295	389.351	389.351
Persentase	16%		14%	14%	14%	7%	6%
3 Porsi Kab/Kota (Rp. Juta)	3.089.179	3.089.179	3.089.179	3.089.179	3.089.179	1.557.405	1.557.405
Persentase	65%	63%	57%	55%	55%	27%	26%
Total Dana Otsus (Rp. Juta)	4.777.068	4.940.430	5.395.052	5.615.817	5.580.152	5.850.270	5.861.909

2002-2006

2007-2013

2014-2020

01

Menetapkan Perdatus Tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua yang sebelumnya belum dapat terwujud

02

Mengubah porsi alokasi dana otus yang sebelumnya 40% untuk provinsi & 60% untuk kab/kota menjadi 20% untuk provinsi & 80% untuk kab/kota

03

Akselerasi pembangunan kampung melalui PROSPEK, Gerbangmas, & BANGGA Papua

Alokasi Dana Otsus untuk Program Strategis Bersama Provinsi & Kab/Kota

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	PROSPPEK	515.6	515.6	565.6	550	522.7	-
2	Kartu Papua Sehat (KPS) dan RS	250	250	300	300	270	725
3	Gerbang Mas	150	250	250	250	200	-
4	Bangga Papua	-	-	-	-	150	109
5	Perumahan dan Fasilitas Umum	-	63.36	100	100	80	100.9
6	Pendidikan (Beasiswa Unggul Papua dan Pendidikan Lainnya)	-	-	318	554.3	496	510.9
7	Pengalihan Kewenangan (SMU/SMK)	-	-	-	-	-	957.6
8	PON XX	-	-	-	-	-	1.105.698
9	Ekonomi	-	-	-	-	-	60.23
10	Keagamaan	-	-	-	-	-	70.2
11	Perencanaan dan Kelembagaan Khusus	-	-	-	-	-	264
Total Alokasi Program Starategis Lintas Kab/Kota		915.6	1.078.956	1.533.578	1.754.343	1.718.679	3.903.514

01

Selama Periode tahun 2014-2020, terdapat **6 PROGRAM YANG BERSIFAT REGULER & MENDAPATKAN ALOKASI DOK SETIAP TAHUNNYA**, yaitu PROSPEK, Kartu Papua Sehat, Gerbang Mas, bantuan Perumahan, Pendidikan dan Beasiswa Unggul Papua & Bangga Papua

02

Adapun **6 PROGRAM LAINNYA LEBIH BERSIFAT INSIDENTIL** memenuhi kebutuhan yang ada pada tahun tertentu, seperti; PON, pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan SMU/SMK, Perencanaan Kelembagaan Khusus dan Bantuan Keagamaan



4

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Papua Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus



Perkembangan IPM Papua Tahun 2000-2019

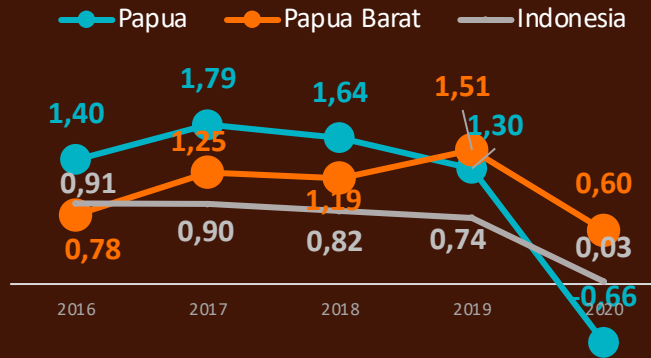
Indeks Pembangunan Manusia 2020

- Relatif sangat tinggi (3 - 7,4%)
- Relatif tinggi (7,5 - 12,4%)
- Relatif sedang (12,5 - 19,8%)
- Relatif rendah (19,9 - 31%)

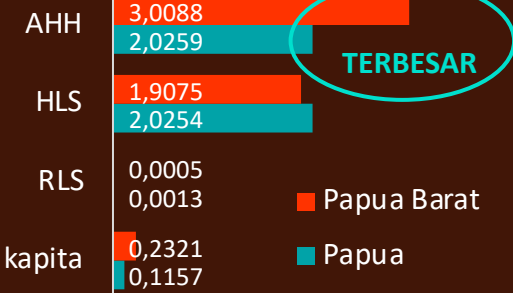


Meskipun IPM Papua relatif paling rendah, namun mengalami **AKSELERASI/ PERTUMBUHAN YANG SIGNIFIKAN** dibandingkan nasional (kecuali pada tahun 2020)

Laju Pertumbuhan IPM 2016-2020



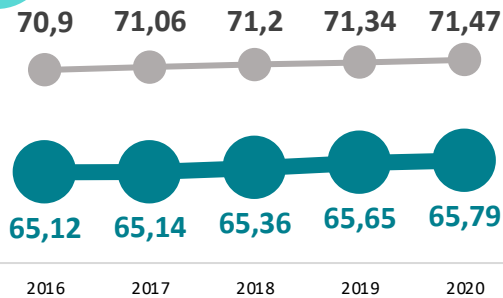
Elastisitas Faktor Pembentuk IPM



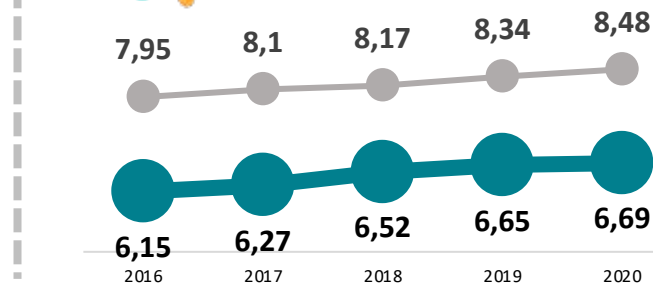
Berdasarkan perhitungan elastisitas, Angka Harapan Hidup memiliki **DAYA UNGKIT PALING BESAR** & signifikan terhadap peningkatan IPM di Papua



Angka Harapan Hidup



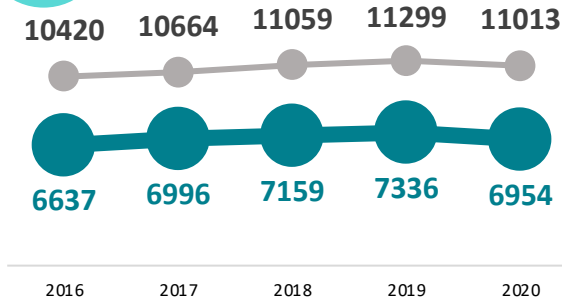
Rata-rata Lama Sekolah



● Papua ● Indonesia



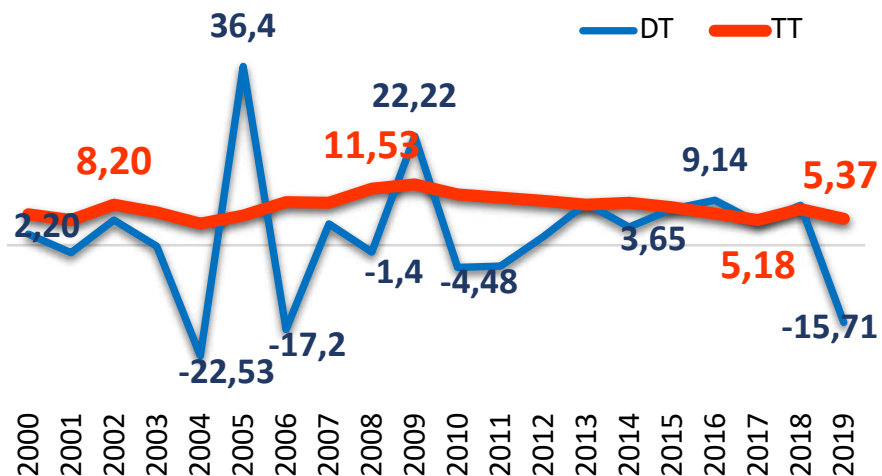
Pengeluaran Per Kapita



Tingginya perkembangan nilai pengeluaran per kapita merefleksikan **MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT & KEMAMPUAN EKONOMI RUMAH TANGGA.**

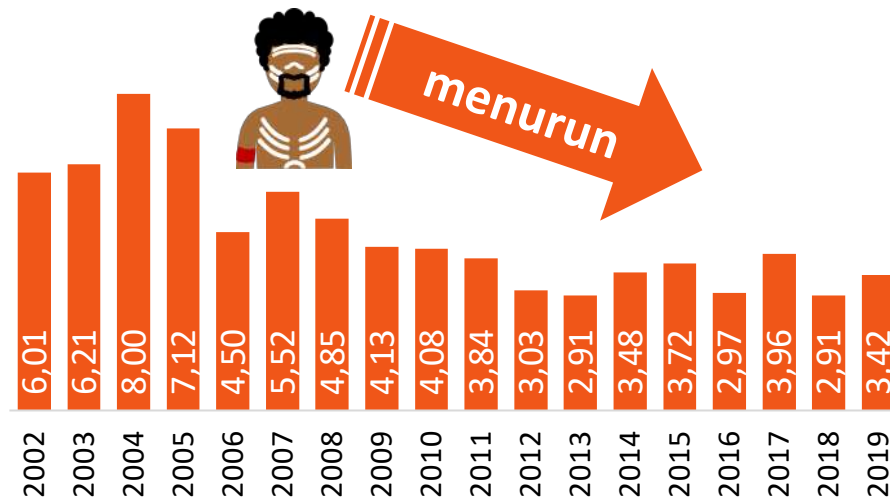
Perekonomian Papua Tahun 2000-2019

Laju Pertumbuhan Ekonomi

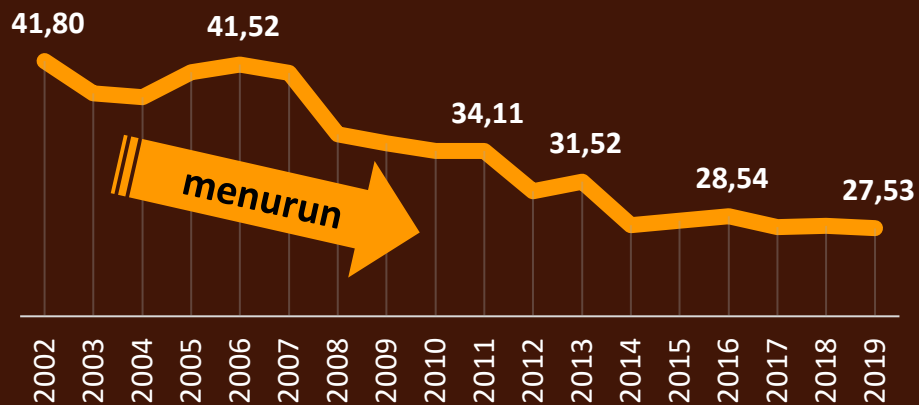


Penurunan Tingkat Pengangguran di Papua mengindikasikan bergeraknya sektor ekonomi yang memberi penghidupan kepada masyarakat. Meskipun demikian laju pertumbuhan ekonomi masih fluktuatif.

Tingkat Pengangguran Terbuka

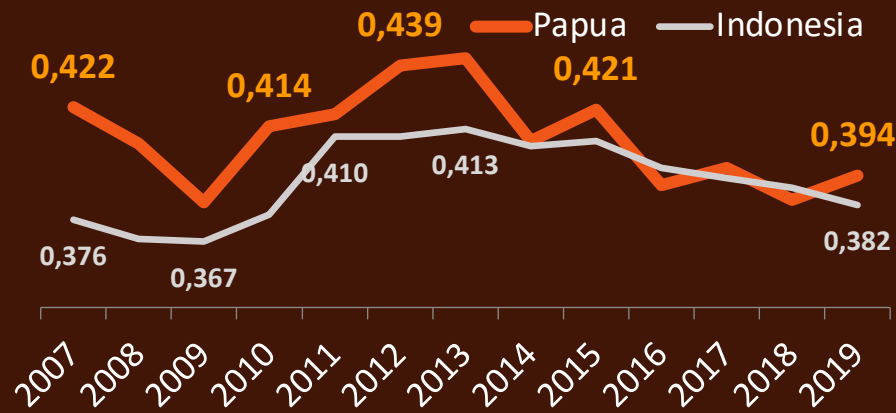


Angka Kemiskinan



Terdapat **penurunan indeks gini & angka kemiskinan** yang cukup signifikan selama tahun 2002-2019, meskipun demikian tingkat ketimpangan pendapatan Papua masih lebih tinggi dibanding nasional.

Gini Ratio





5

Arah Kebijakan
Pembangunan
Kewilayahan Papua



Pengembangan
Kewilayahan
Papua yang
**HOLISTIK
INTEGRATIF,
TEMATIK &
SPATIAL**





Pengembangan Kewilayahan Papua yang HOLISTIK INTEGRATIF, TEMATIK & SPATIAL

SAERERI



CLUSTER EKONOMI: perikanan, pariwisata

PENINGKATAN AKSES & KUALITAS PENDIDIKAN:

1. Pengembangan SMK perikanan, pariwisata,
2. Pengembangan Balai Latihan Kerja
3. Pengembangan riset & lembaga standarisasi mutu
4. Pembangunan technopark sebagai center of excellence sektor unggulan



PENINGKATAN AKSES & KUALITAS KESEHATAN:

Pengembangan RSUD tipe B, Rumah sakit pratama, Sarana kesehatan terapung



PENINGKATAN KONEKTIVITAS

MEE PAGO



CLUSTER EKONOMI: pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan

PENINGKATAN AKSES & KUALITAS PENDIDIKAN:

1. Pengembangan SMK pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, pertambangan
2. Pengembangan Balai Latihan Kerja
3. Pembangunan technopark sebagai center of excellence sektor unggulan



PENINGKATAN AKSES & KUALITAS KESEHATAN:

Pengembangan RSUD tipe B, Rumah sakit pratama, RSJ



PENINGKATAN KONEKTIVITAS



**PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
"GREEN GROWTH BERBASIS WILAYAH ADAT"
DIPERLUKAN** dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan & berkelanjutan.

MAMTA



CLUSTER EKONOMI: pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata

PENINGKATAN AKSES & KUALITAS PENDIDIKAN:

1. Pengembangan SMK pertanian, pariwisata
2. Pengembangan Balai Latihan Kerja
3. Pembangunan technopark sebagai center of excellence sektor unggulan* (opsional)



PENINGKATAN AKSES & KUALITAS KESEHATAN:

Pengembangan RSUD tipe A, RS mata, Rumah sakit pratama, RSJ, Sarana kesehatan keliling



PENINGKATAN KONEKTIVITAS

LA PAGO



CLUSTER EKONOMI: pertanian, peternakan, perkebunan

PENINGKATAN AKSES & KUALITAS PENDIDIKAN:

1. Pengembangan SMK pertanian, peternakan, perkebunan
2. Pengembangan Balai Latihan Kerja



PENINGKATAN AKSES & KUALITAS KESEHATAN:

Pengembangan RSUD tipe B, Rumah sakit pratama, Sarana kesehatan keliling



PENINGKATAN KONEKTIVITAS

ANIM HA



CLUSTER EKONOMI: pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata

PENINGKATAN AKSES & KUALITAS PENDIDIKAN:

1. Pengembangan SMK pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata
2. Pengembangan Balai Latihan Kerja



PENINGKATAN AKSES & KUALITAS KESEHATAN:

Pengembangan RSUD tipe B, Rumah sakit pratama, RSJ, Sarana kesehatan terapung



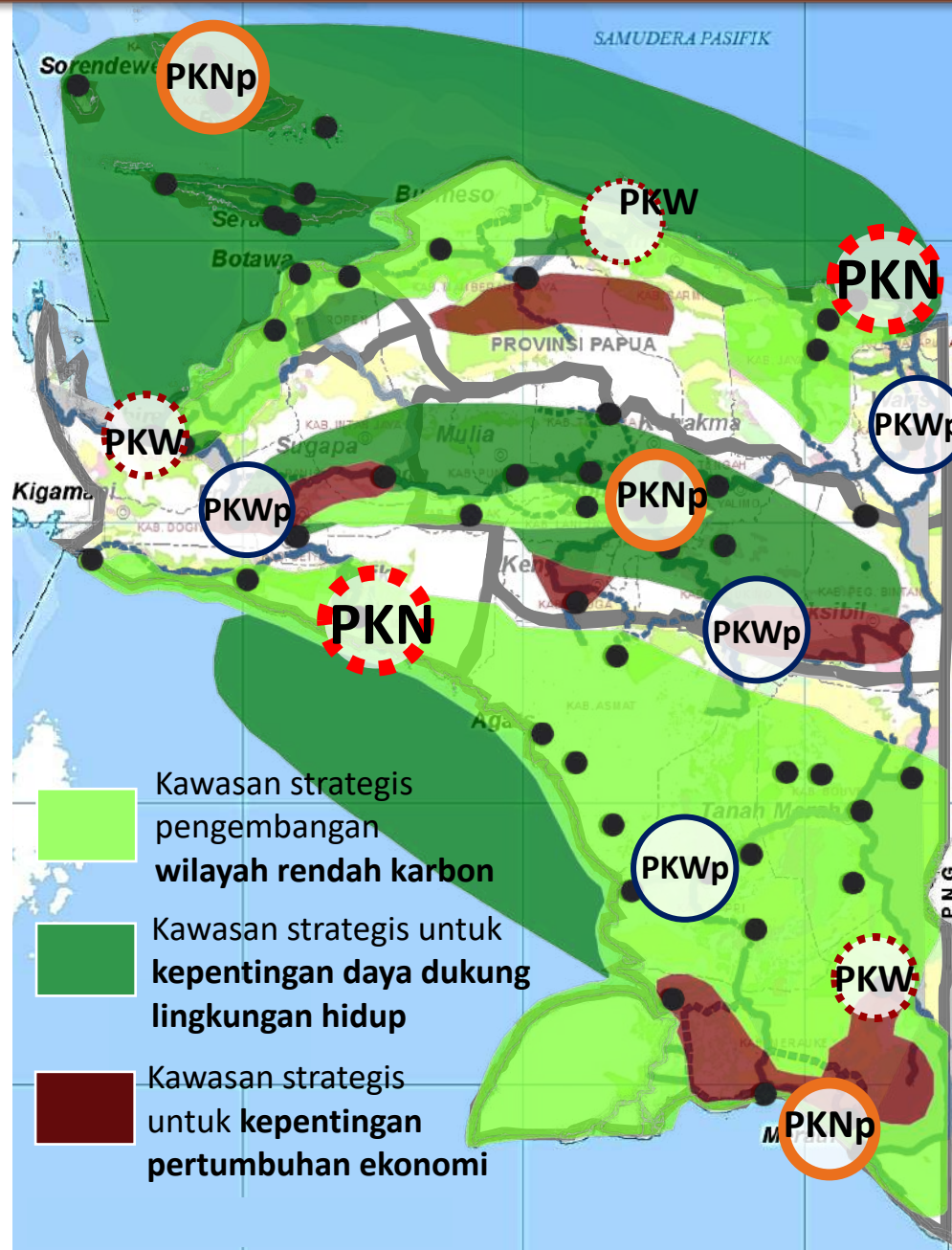
PENINGKATAN KONEKTIVITAS

Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah Papua

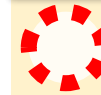
Arah pembangunan kewilayahan Papua terintegrasi dengan RPJMN, RTRWP, dan KLHS, khususnya dalam penetapan lokasi dan fungsi ruang, untuk **mewujudkan keseimbangan perkembangan wilayah & keberlanjutan lingkungan**

Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan **"Green Growth berbasis wilayah adat"** diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua.

Hal ini diperlukan terutama dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan & berkelanjutan.



PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)



TIMIKA: pusat jasa, pusat pengolahan, KSN & simpul transportasi utama untuk Papua bagian selatan
JAYAPURA: pusat jasa, pusat pengolahan, simpul utama transportasi skala nasional

PUSAT KEGIATAN NASIONAL PROMOSI (PKNp)



WAMENA: mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah
BIAK: KSN, kawasan andalan, potensi pengembangan pariwisata
MERAUKE: mendorong percepatan pertumbuhan bagian selatan

PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)



MUTING: pusat pelayanan wilayah bagian selatan
NABIRE: pusat pelayanan wilayah bagian barat
SARMI: pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah

PUSAT KEGIATAN WILAYAH PROMOSI (PKWp)



DEKAI, KEI, ENAROTALI, & WARIS: Dipromosikan menjadi PKW (pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten), karena memiliki fasilitas perkotaan yang memadai

PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)






pusat kegiatan industri, pusat jasa, dan simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan

Pengembangan Kluster Ekonomi di Kawasan Strategis

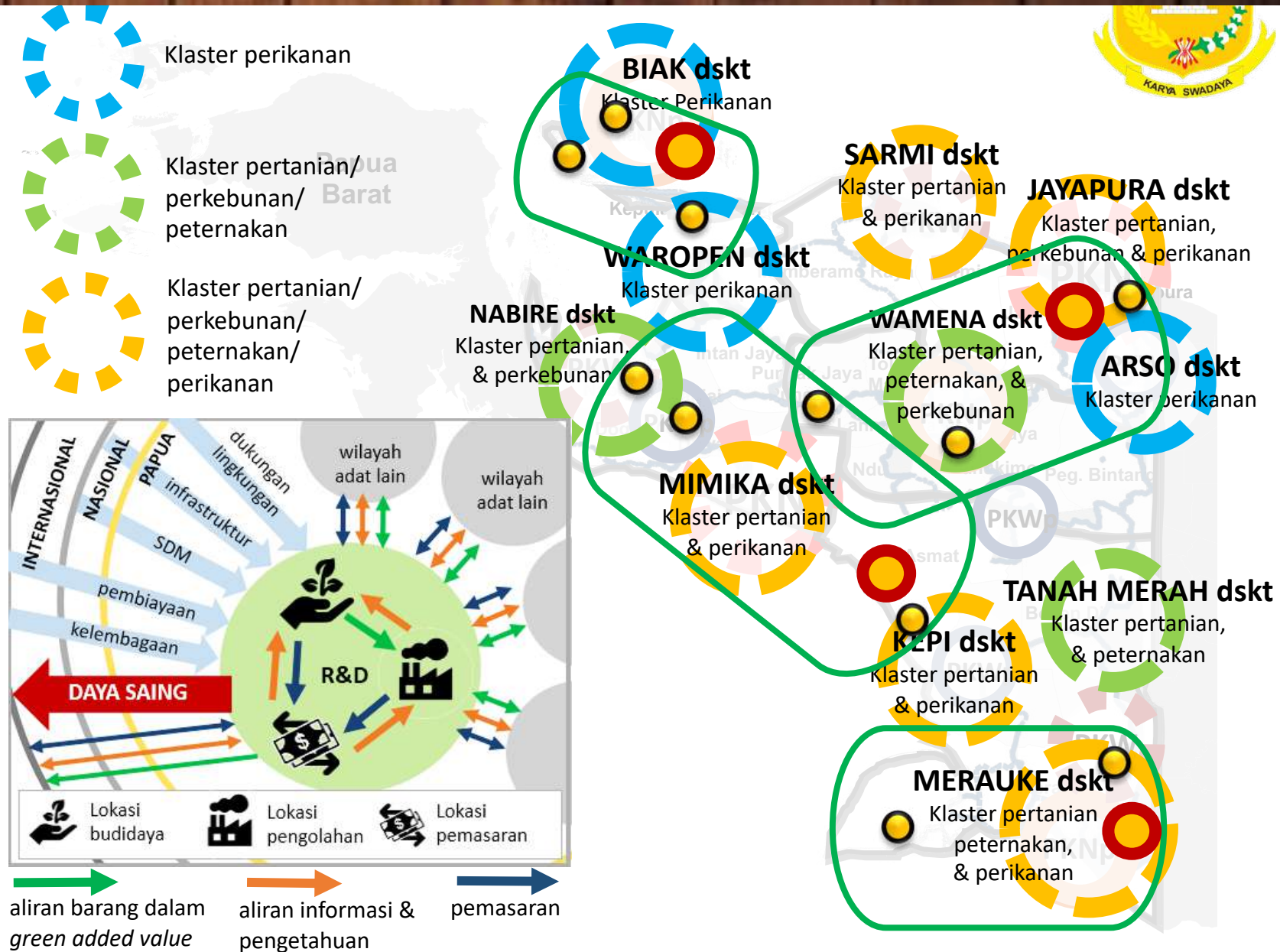
PERWUJUDAN KETERKAITAN EKONOMI HULU DAN HILIR

Pengembangan **kluster pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**, yang terdiri atas sentra produksi, industri pengolahan komoditas, dan lokasi pemasaran

Pengembangan **kluster pariwisata** di lokasi yg sesuai dengan arahan Rencana Induk Pariwisata Nasional (Ripparnas):

-  Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
-  Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)
-  Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)

Terdapat hubungan integrasi antara kluster pariwisata dengan kluster lainnya, yaitu sebagai lokasi promosi dan pemasaran output produksi kluster ekonomi.



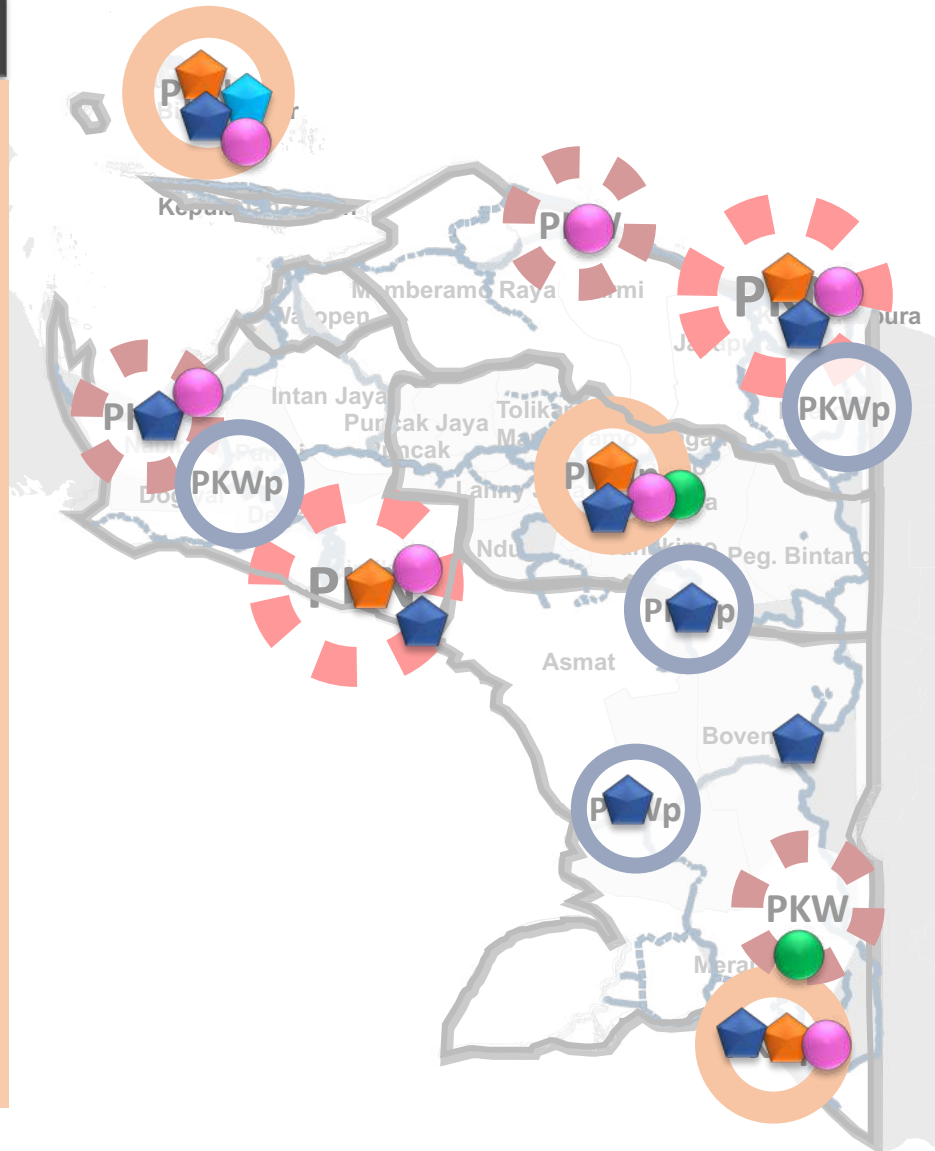
Penguatan Kualitas SDM



Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN

- Peningkatan **kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun** yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua
- Pembangunan dan pengembangan **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK)** di lima wilayah adat, serta **Politeknik berbasis potensi unggulan**
- **Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP** serta rumah guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama)
- **Peningkatan akses dan kualitas pendidikan** melalui penyebaran tenaga pendidikan dan guru kunjung, terutama di daerah terpencil
- Peningkatan **kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, profesionalisme dan tunjangan guru**
- Peningkatan **kemitraan lembaga pendidikan** dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya
- **Akselerasi dan afirmasi pendidikan** dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua



Politeknik agroindustri pengembangan komoditas unggulan terakreditasi B di Jayawijaya* atau Merauke* (*opsional)

Pembangunan technopark sebagai *center of excellence* sektor unggulan di 5 wilayah adat

SMK pertanian, pariwisata, dan/atau pertambangan di Jayapura, Biak, Sarmi, Merauke, Timika, Nabire, dan Wamena

Balai Latihan Kerja di Wamena, Merauke, Biak, Timika, Nabire, Jayapura, Yahukimo, Keki, Boven Digoel

Pengembangan riset dan lembaga standarisasi mutu di Biak

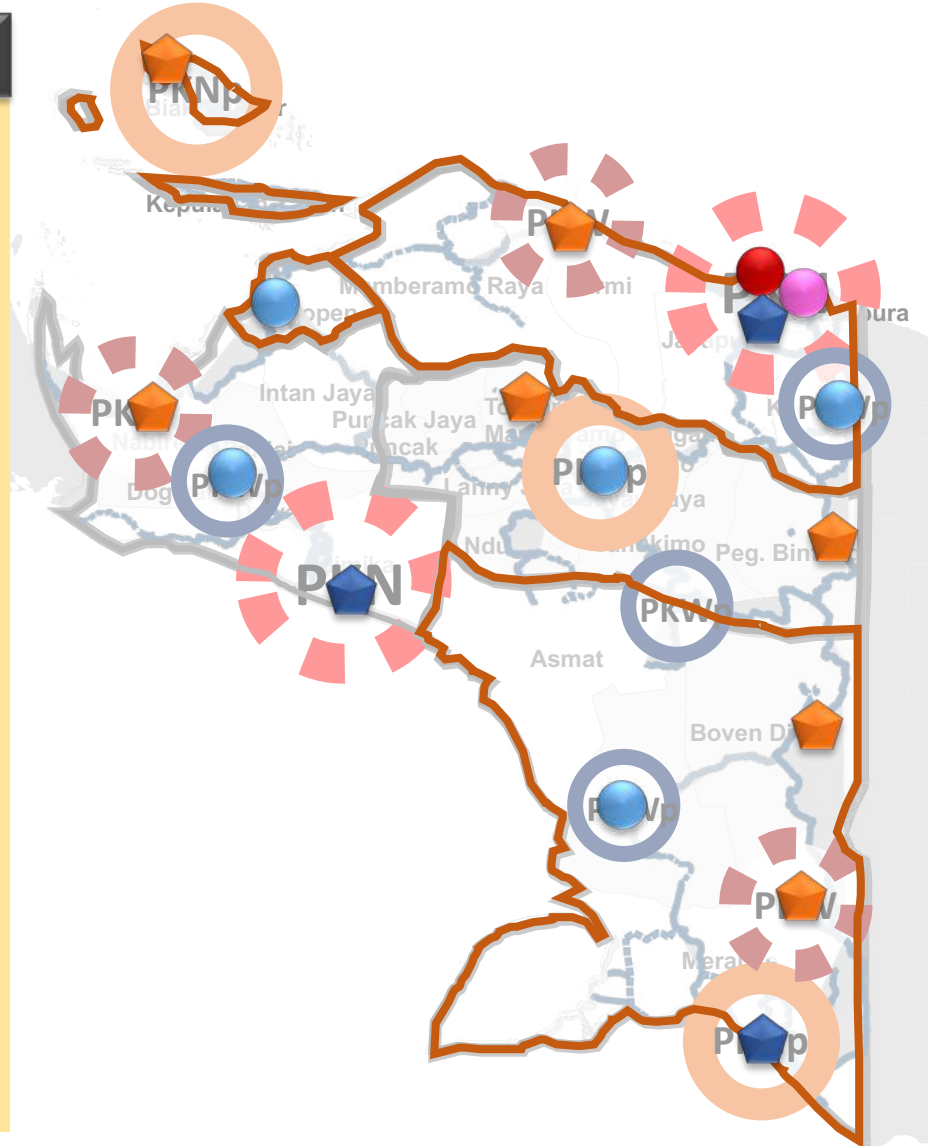
Penguatan Kualitas SDM



Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN

- Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan **program jaminan kesehatan Papua (KPS)** baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran
- Peningkatan **sistem peringatan dini** untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
- **Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya**
- Memperkuat dan memantapkan **pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua** melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak
- **Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan**
- **Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita** serta peningkatan dan **pemenuhan gizi masyarakat**
- Menjamin **ketersediaan tenaga kesehatan secara merata** di semua Puskesmas dan jaringannya
- Penyempurnaan **sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan**
- **Pencegahan penyakit menular** seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC
- Pembangunan dan pengembangan **rumah sakit rujukan** di 5 wilayah adat



● **RSUD tipe A** di Jayapura

● **RSUD tipe B** di La Pago, Anim Ha, Mee Pago dan Saereri

● **Rumah sakit pratama** di Supiori, sarmi, tolikara, dogiyai, mindiptana, dan kawasan perbatasan

● **RS mata** di Jayapura

● **RSJ** di Jayapura, Merauke, dan Mimika

Sarana kesehatan terapung di Ha Anim dan Mamta

Sarana kesehatan keliling di Saereri dan Mamta

Pengembangan Infrastruktur - Konektivitas

ARAH PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS

1

Memadukan **sistem pelayanan transportasi antarmoda**

2

Menciptakan dan meningkatkan **aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat**, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga

3

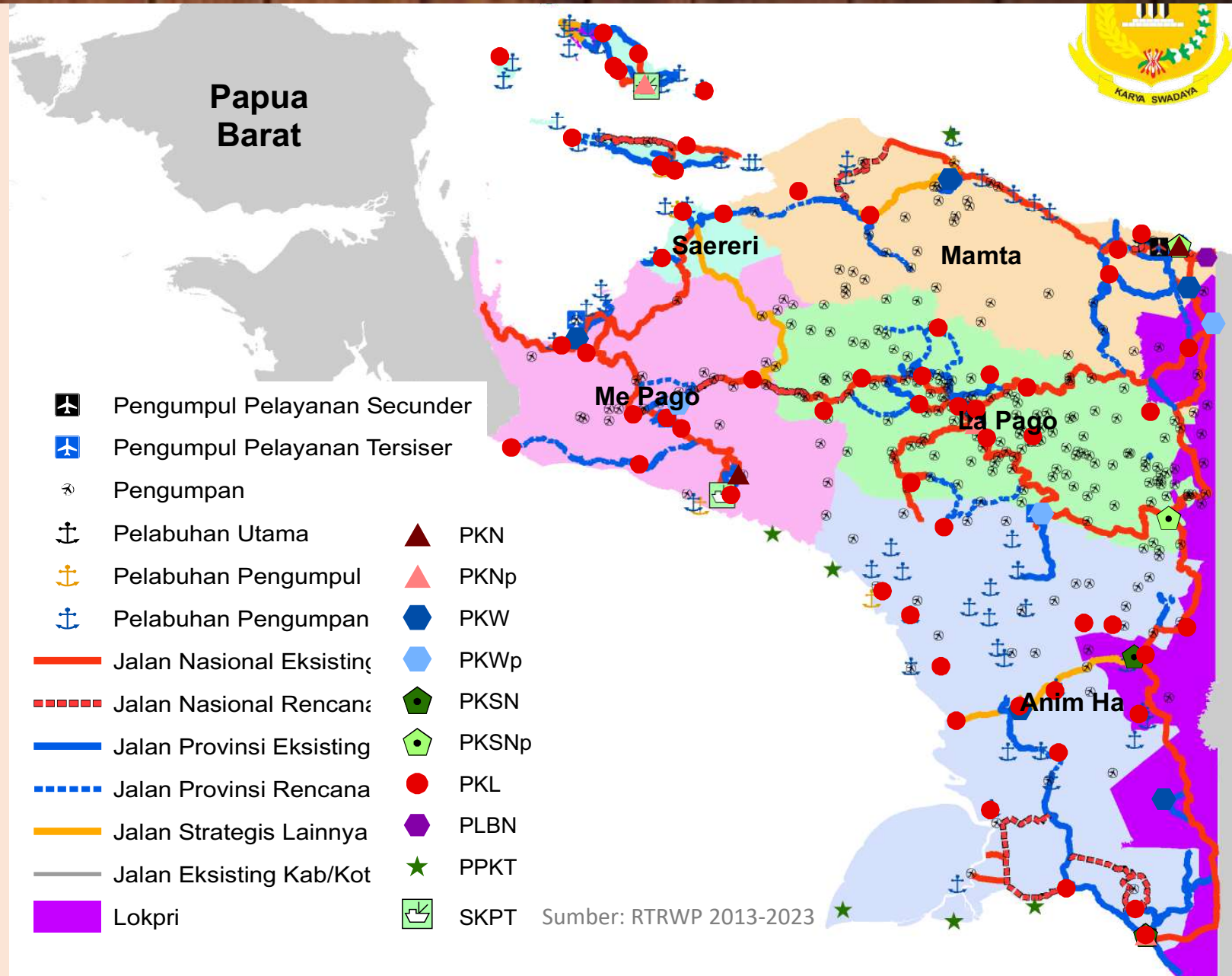
Menghubungkan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal dengan pusat pertumbuhan dan wilayah luar Papua, khususnya dalam pengembangan ekonomi OAP

4

Mengatasi **kesenjangan pembangunan antar wilayah**

5

Menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan)





6

Rencana Program
yang Dibiayai Dana
Otonomi Khusus
Tahun 2019-2023
Berdasarkan RPJMD Papua



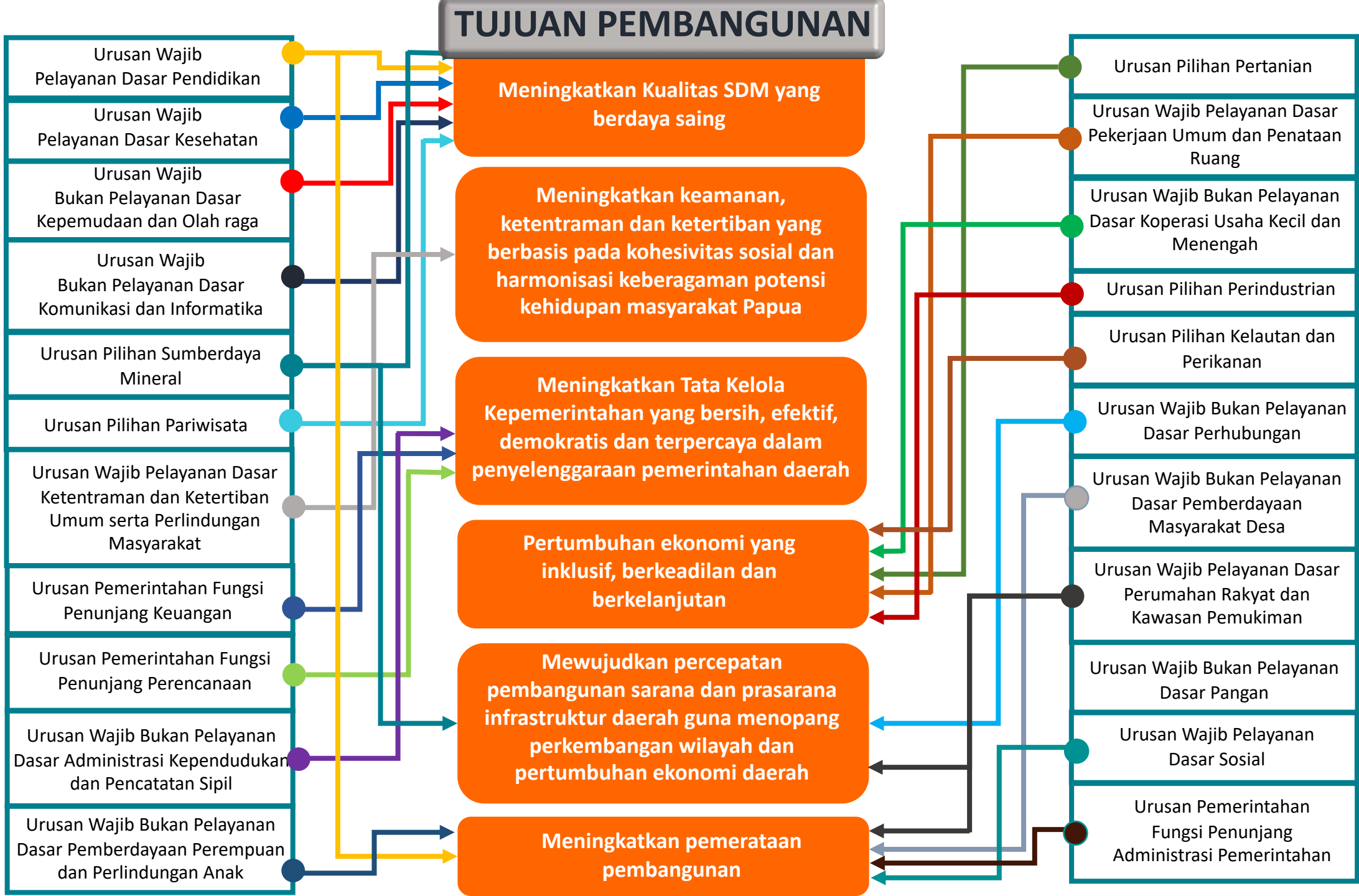
Misi dan Tujuan Pembangunan Provinsi Papua yang dibiayai oleh Dana Otsus

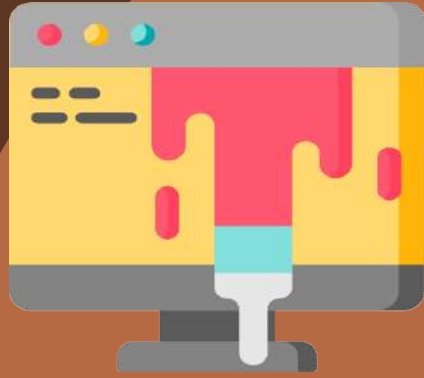
5 Misi Pembangunan Provinsi Papua Periode 2019-2023 (Berdasarkan RPJMD Provinsi)



Secara general, Dana Otsus yang diterima oleh Provinsi Papua **diatur peruntukannya didalam berbagai program pembangunan di RPJMD** untuk **berbagai urusan** yang diamanatkan UU 21/2001, baik untuk **Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**

Program Prioritas yang dibiayai oleh Dana Otsus Berdasarkan Bidang Urusan





Pengkodean Pemanfaatan Dana Otsus

dalam Pemetaan Program prioritas yang dibiayai oleh Dana Otsus di Provinsi Papua

Catatan:

Pemetaan detail per program bidang urusan dapat dilihat di lampiran

Belanja Langsung

- Bidang Pendidikan **A1**
- Bidang Kesehatan **A2**
- Bidang Infrastruktur **A3**
- Bidang Ekonomi Kerakyatan **A4**
- Bantuan untuk institusi keagamaan, Lembaga adat asli dan Yayasan pendidikan **A5**
- Penataan Data **A6**
- Monitoring dan Evaluasi **A7**
- Peningkatan Kinerja Keuangan **A8**
- Urusan strategi bersama Provinsi dan Kab/Kota **A9**
- Dana tambahan otonomi khusus dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur **A10**

Belanja Tidak Langsung

- B1** Bidang Pendidikan
- B2** Bidang Kesehatan
- B3** Bidang Infrastruktur
- B4** Bidang Ekonomi Kerakyatan
- B5** Bidang Bantuan Afirmasi
- B6** Perencanaan, Monev dan Pelaporan
- B7** Prioritas lainnya
- B8** Urusan strategi bersama Provinsi dan Kab/Kota
- B9** Dana tambahan otonomi khusus dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur

Program Prioritas yang dibiayai oleh Dana Otsus Berdasarkan Pos Pemanfaatan Dana Otsus

Tujuan Pembangunan	Flagship	Fokus sektor yang dibangun	Kebijakan Belanja
Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	Gemas Papua	Pendidikan dan Kesehatan	A1, B1, A2, B2, B5
	Infradas Papua	Air bersih, Pengelolaan persampahan, limbah dan sanitasi	A2, B2, A3, B3, A10, B9
	Sukses PON XX Papua	Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan PON, Pembangunan ekonomi lokal	A3, A4, A9, A10, B8
	Mandiri Pangan Papua	Pangan	A4, B4
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	Kesetaraan Gender & Kemitraan Papua	Pembinaan Ormas/ LSM di Daerah	A5, B7

Program Prioritas yang dibiayai oleh Dana Otsus Berdasarkan Pos Pemanfaatan Dana Otsus

Tujuan Pembangunan	Flagship	Fokus sektor yang dibangun	Kebijakan Belanja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Perlindungan & Keberlanjutan Adat Papua	Perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan	A8 B6
	Infradas Papua	Peningkatan Infrastruktur dengan program pengelolaan keuangan	B9
	Reformasi Birokrasi Papua	Administrasi kependudukan	A6 A7 B7
	Sukses Pon XX Papua	Penguatan sistem perencanaan	B6
Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah	Infradas Papua	Sarana dan Prasarana Perhubungan, penyediaan air, pengendalian banjir, pengembangan energi terbarukan, pengembangan Kawasan perumahan dan permukiman, pengembangan sistem jaringan komunikasi	A3 A10 B3 B9

Program Prioritas yang dibiayai oleh Dana Otsus Berdasarkan Pos Pemanfaatan Dana Otsus

Tujuan Pembangunan	Flagship	Fokus sektor yang dibangun	Kebijakan Belanja
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Mandiri Pangan Papua	Ketahanan pangan, efisiensi perdagangan, perlindungan konsumen, peningkatan kesejahteraan petani	A4 B4
	Berdaya Ekomas Papua	Pengembangan agribisnis, peningkatan produksi sektor ekonomi, UMKM, Industri	A3 B3 A4 B4
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Perlindungan & Keberlanjutan Adat Papua	Pemberdayaan masyarakat kampung, dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	A3 B3 B1 B2 B7 A10 B9
	Mandiri Pangan Papua	Pemberdayaan masyarakat kampung, ketahanan pangan	A4 B7
	Kampung Mandiri Papua	Pemberdayaan masyarakat kampung	B7
	Gemas Papua (Generasi Emas Papua)	Pendidikan, pemberdayaan social	A1 A9 B3 B5 B8

**Program Prioritas yang dibiayai oleh Dana Otsus
Berdasarkan Pos Pemanfaatan Dana Otsus**

Tujuan Pembangunan	Flagship	Fokus sektor yang dibangun	Kebijakan Belanja
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Infradas Papua	Penanggulangan bencana (tingkat Provinsi dan Kabupaten)	B7
	Kesetaraan Gender dan Kemitraan	Kelembagaan pengarusutamaan gender, kualitas hidup perempuan dan anak, peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan	B7

----- Pemetaan detail per program bidang urusan dapat dilihat di lampiran -----



Lampiran



Pemetaan Rencana Pembangunan

yang Dibiayai Dana Otonomi Khusus Tahun 2019-2023 Berdasarkan RPJMD Papua



Pemetaan program dilakukan berdasarkan misi dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Papua 2019-2023.

Pengkodean yang dilakukan dalam pemetaan adalah:

1. KOLOM "WILAYAH ADAT":

1	Prioritas 1
2	Prioritas 2
3	Prioritas 3

2. KOLOM "KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG":

A1	Dana Otsus Bagian Provinsi Bidang Pendidikan
A2	Dana Otsus Bagian Provinsi Bidang Kesehatan
A3	Dana Otsus Bagian Provinsi Bidang Infrastruktur
A4	Dana Otsus Bagian Provinsi Bidang Ekonomi Kerakyatan
A5	Dana Otsus Bagian Provinsi Bagian bantuan
A6	Dana Otsus Bagian Provinsi untuk Penataan Data
A7	Dana Otsus Bagian Provinsi untuk Monev
A8	Dana Otsus Bagian Provinsi untuk Peningkatan Kinerja Keuangan
A9	Dana Otsus Program Urusan Strategis Bersama Provinsi & Kab/Kota
A10	Dana tambahan otonomi khusus dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur

3. KOLOM "KEBIJAKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG":

B1	Dana Otsus Bagian Kab/Kota Bidang Pendidikan
B2	Dana Otsus Bagian Kab/Kota Bidang Kesehatan
B3	Dana Otsus Bagian Kab/Kota Bidang Infrastruktur
B4	Dana Otsus Bagian Kab/Kota Bidang Ekonomi Kerakyatan
B5	Dana Otsus Bagian Kab/Kota Bantuan Afirmasi
B6	Dana Otsus Bagian Kab/Kota Bagian Perencanaan, Monev dan Pelaporan
B7	Dana Otsus Bagian Kab/Kota untuk Prioritas Lainnya
B8	Dana Otsus Program Urusan Strategis Bersama Provinsi & Kab/Kota
B9	Dana tambahan otonomi khusus dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur

SASARAN STRATEGIS	FLAGSHIP	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN NOMENKLATUR ANGGARAN	URUSAN	KEWENANGAN		REKOR BELANJA		WILAYAH ADAT			
					PROVINSI	KAB/KOTA	SALURAN LANGSUNG	INDIKATOR	REKOR BELANJA LANGSUNG	REKOR BELANJA TIDAK LANGSUNG		
S1 Meningkatkan Kualitas Mutu dan Tawar Kekuatan Pendidikan	GEMAS PAPIA (GENERASI EMAS PAPIA)	Program pembangunan dan pengembangan SMK, BLK dan Politeknik Program Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang mematuhi standar nasional pendidikan bagi masyarakat Papua Program akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Pendidikan	√	√	A1	1	1	1	1	
			Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Pendidikan	√	√	A1	1	1	1	1	
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Pendidikan	√	√	B1	2	2	1	1	1
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Pendidikan	√	√	B1	2	2	1	1	1
S3 Meningkatkan dampak kesehatan masyarakat	GEMAS PAPIA (GENERASI EMAS PAPIA)	Program penanganan penyakit kesehatan Papua Program peningkatan kompetensi masyarakat berkebutuhan khusus Program pengabdian masyarakat kesehatan Program Pengabdian dan Pengembangan Penyuluhan Masyarakat Program Peningkatan dan Pengembangan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pengembangan Gula Internasional Program Pengabdian dan Pengembangan Penyuluhan Masyarakat Program pengabdian dan pembangunan akademis, non profit dan sistem rujukan Program penanganan upaya kesehatan berbasis kendali mutu Papua melalui pelaksanaan keakreditasi pro aktif berprestasi Program pengembangan penyuluhan kesehatan pada ibu, bayi, dan balita Program pengabdian kesehatan Anak Bangsa Program pengabdian dan pengembangan kesehatan masyarakat Program pengabdian dan pengembangan kesehatan masyarakat Program pengabdian dan pengembangan kesehatan masyarakat	Program Layanan Kesehatan Perencanaan	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	1	1	1	1	
			Program Pengabdian dan Pengembangan Penyuluhan Masyarakat	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program Peningkatan dan Pengembangan Masyarakat	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program Pengembangan Gula Internasional	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program Pengabdian dan Pengembangan Penyuluhan Masyarakat	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program pengabdian dan pembangunan akademis, non profit dan sistem rujukan	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program penanganan upaya kesehatan berbasis kendali mutu Papua melalui pelaksanaan keakreditasi pro aktif berprestasi	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program pengembangan penyuluhan kesehatan pada ibu, bayi, dan balita	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program pengabdian kesehatan Anak Bangsa	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program pengabdian dan pengembangan kesehatan masyarakat	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1
			Program pengabdian dan pengembangan kesehatan masyarakat	Usulan Wajib Pelaksanaan Dasar Kesehatan	√	√	A2	B2	2	2	1	1

MISI 01

MENINGKATNYA KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING

Tujuan/Prioritas Daerah 1:

Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing

SASARAN STRATEGIS	FLAGSHIP (9)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN NOMENKLATUR ANGGARAN	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
S1 Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	GEMAS PAPUA (GENERASI EMAS PAPUA)	Program pembangunan dan pengembangan SMK, BLK, dan Politeknik	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	V		A1		1	1	1	1	1	
			Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	V		A1							
		Program Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		V		B1		1	1	1	1	1
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		V		B1		2	2	1	1	1
		Program akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	V	V	A1	B5		2	2	2	2	2
			Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	V	V	A1	B5		2	2	1	1	1
S3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	GEMAS PAPUA (GENERASI EMAS PAPUA)	Program pemantapan jaminan kesehatan Papua	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V		A2		1	1	1	1	1	
			Program peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap wabah	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V	V	A2	B2					
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	V	V	A2	B2		2	2	1	1	1
		Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V	V	A2	B2						
		Program pengembangan Data/Informasi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V	V	A2	B2		2	2	1	1	1
			Program peningkatan dan pembenahan puskesmas, rumah sakit dan sistem rujukan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V	V	A2	B2		2	2	1	1
		Program Sumber Daya Kesehatan		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V	V	A2	B2						
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V	V	A2	B2						
		Program pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V		A2			1	1	1	1	1
			Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V		A2							
		Program pemantapan upaya kesehatan berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/ bergerak	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V	V	A2	B2		2	2	1	1	1
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		V		B2		2	2	1	1
		Program pengurangan penyakit dan kematian pada ibu, bayi, dan balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		V		B2		2	2	1	1	1
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		V		B2						
		Program peningkatan kualitas SDM kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	V	V	A2	B2		2	2	1	1	1
				Program pengembangan Lingkungan Sehat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan dan pekerjaan umum	V	V	A2 A3 A10	B2 B3 B9		2	2	2	2

MISI 01

MENINGKATNYA KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING

Tujuan/Prioritas Daerah 1:

Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing

SASARAN STRATEGIS	FLAGSHIP (9)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN NOMENKLATUR ANGGARAN	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
S4 Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	SUKSES PON XX PAPUA	Program peningkatan prestasi kepemudaan	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	v	v	A9	B8	1	1	1	1	1	
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	v	v	A9	B8						
		Program penyelenggaraan sarana dan prasarana PON	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	v	v	A3	A9	B8					
					A10									
			Program Sumber Daya Kesehatan (pos kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis)	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	v	v	A3	A9	B8					
							A3	A10						
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	v		A3	A9	B8	1	1	1	1	1
							A3	A10						
			Program Pelayanan Air Bersih	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	v	v	A3	A9	B8					
							A3	A10						
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	v		A3	A9	B8								
				A3	A10									
Program peningkatan ekonomi masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan PON	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Urusan Pilihan Pariwisata	v	v	A4	B4	1	1	1	1	1			
					A9	B8								
S6 Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	MANDIRI PANGAN PAPUA	Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	v	v	A4	B4	1	1	1	1	1	

MEMANTAPKAN RASA AMAN, TENTRAM & DAMAI SERTA KEHIDUPAN DEMOKRASI MEMPERKUAT BINGKAI NKRI

Tujuan/Prioritas Daerah 2:

Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua

SASARAN STRATEGIS	FLAGSHIP	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN NOMENKLATUR ANGGARAN	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
S11 Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN PAPUA	Program penguatan kemitraan dalam pembuatan/ pengambilan keputusan publik, pembangunan, dan ketertiban masyarakat	Program Fasilitasi Pembinaan Ormas/ LSM di Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	V	V	A5	B7	2	2	2	2	2

MISI 03

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Tujuan/Prioritas Daerah 3:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

SASARAN STRATEGIS	FLAGSHIP (9)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN NOMENKLATUR ANGGARAN	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT						
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA		
S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	PERLINDUNGAN & KEBERLANJUTAN ADAT PAPUA	Penguatan kebijakan pembagian dana Otsus untuk mengurangi kesenjangan, insentif jasa lingkungan, dan infrastruktur	Program perencanaan pembangunan daerah	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	v	v		B6	2	2	2	2	2	
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	v	v	A8	B6						
		INFRADAS PAPUA	Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	v	v		B9	2	2	2	2	2	
S13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	REFORMASI BIROKRASI PAPUA	Program penguatan kelembagaan untuk memastikan OAP terdata secara terpilah dan memiliki identitas kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	v	v	A6	B7	1	1	1	1	1	
								A7							
S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	SUKSES PON XX PAPUA	Program penguatan sistem perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang dan pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan, yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Kerjasama Pembangunan	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	v	v		B6	1	1	3	3	3	
										INFRADAS PAPUA	Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	Program Kerjasama Pembangunan	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	v	v
S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	REFORMASI BIROKRASI PAPUA	Program penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	v		A8							
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	v		A8							
				Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	v		A8			2	2	2	2	2
				Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	v		A7							

MISI 04

PENGUATAN & PERCEPATAN PEREKONOMIAN DAERAH SESUAI POTENSI UNGGULAN LOKAL & PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KULTURAL & BERKELANJUTAN

Tujuan/Prioritas Daerah 4:

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS	FLAGSHIP (9)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN NOMENKLATUR ANGGARAN	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAWTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
S16	Mandiri Pangan Papua	Program penguatan nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Urusan Pilihan Pertanian	√		A4		1	1	1	1	1	
			Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	√	√		B4	1	1	1	1	1
		Program pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	Urusan Pilihan Pertanian	√	√		B4						
			Program Pengembangan Agribisnis	Urusan Pilihan Pertanian	√	√		B4						
			Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Urusan Pilihan Pertanian	√	√		B4	1	1	1	1	1	1
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan	Urusan Pilihan Pertanian	√	√		B4						
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Urusan Pilihan Pertanian	√	√		B4						
Program peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, perternakan, dan perikanan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√	√		A3	B3	1	1	1	1	1		
S20	BERDAYA EKOMAS PAPUA	Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan dan menghasilkan nilai tambah komoditas	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	√	√		B4	1	1	1	1	1	
			Program peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mendorong kemandirian ekonomi	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Pilihan Perdagangan	√	√		B4					
		Program pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	√	√		A4	B4	1	1	1	1	1
			Program penguatan nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Urusan Pilihan Perdagangan	√		A4		1	1	1	1	1
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Urusan Pilihan Perdagangan	√		A4							
		Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan dan menghasilkan nilai tambah komoditas	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Pilihan Perdagangan	√	√		A4	B4	1	1	1	1	1
		S21	BERDAYA EKOMAS PAPUA	Program pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	√	√	A4	B4	1	1	1	1
Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan				√	√	A4	B4						
Program peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, perternakan, dan perikanan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap			Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	√	√		A4	B4	1	1	1	1	1

MISI 04

PENGUATAN & PERCEPATAN PEREKONOMIAN DAERAH SESUAI POTENSI UNGGULAN LOKAL & PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS KULTURAL & BERKELANJUTAN

Tujuan/Prioritas Daerah 5:

Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah

SASARAN STRATEGIS	FLAGSHIP (9)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN NOMENKLATUR ANGGARAN	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
S24	INFRADAS PAPUA	Program peningkatan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	v	v	A3	B3	1	1	2	2	2	
							A10	B9						
S26	INFRADAS PAPUA	Program peningkatan pengelolaan air baku yang mendukung produktivitas wilayah	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	v	v	A3	B3	1	1	1	1	1	
		Program pengendalian banjir dan abrasi pantai	Program Pengendalian Banjir	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			A3	B3						
S27	INFRADAS PAPUA	Program peningkatan ketersediaan perumahan layak huni, dengan lingkungan yang sehat dan bersih	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		v		B3	1	1	1	1	1	
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										B3
			Program Pelayanan Air Bersih	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										B3
S28	INFRADAS PAPUA	Program peningkatan ketersediaan energi murah dan energi terbarukan	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	v	v	A3	B3	2	2	1	1	1	
			Program pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral			A3	B3						
S29	INFRADAS PAPUA	Program peningkatan akses informasi dan komunikasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	v	v	A3	A3	2	2	1	1	1	
							A10	A10						

MISI 05

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR & TERTENTU

Tujuan/Prioritas Daerah 6:

Meningkatkan pemerataan pembangunan

SASARAN STRATEGIS	FLAGSHIP (9)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN NOMENKLATUR ANGGARAN	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
S30	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	PERLINDUNGAN & KEBERLANJUTAN ADAT PAPUA	Program percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	V	V	B9	B1	1	1	1	1	1
				Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	V	V	B9	B1					
		MANDIRI PANGAN PAPUA	Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	V	V	B7	A4	1	1	1	1	1
		KAMPUNG MANDIRI PAPUA	Program penguatan kelembagaan kampung	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	V	V	B7		1	1	1	1	1
S31	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	GEMAS PAPUA (GENERASI EMAS PAPUA)	Program akselerasi dan afirmasi pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	V	V	A1	B5					
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	V	V	A1	B5					
				Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	V	V	A1	B5	2	2	1	1	1
				Program Pendidikan Non Formal	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	V	V	A1	B5					
				Program peningkatan ketersediaan perumahan layak huni, dengan lingkungan yang sehat dan bersih	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	V	V		B3	1	1	1	1
			Program perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	V	V	A9	B5 B8	2	2	1	1	1
	MANDIRI PANGAN PAPUA	Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	V	V	A4	B7	1	1	1	1	1	

MISI 05

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR & TERTENTU

Tujuan/Prioritas Daerah 6:

Meningkatkan pemerataan pembangunan

SASARAN STRATEGIS	FLAGSHIP (9)	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN NOMENKLATUR ANGGARAN	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
S32	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	PERLINDUNGAN & KEBERLANJUTAN ADAT PAPUA	Program percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	√	√	A3	B3	1	1	1	1	1
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	√	√	A10	B9					
S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	GEMAS PAPUA (GENERASI EMAS PAPUA)	Program perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel dan kabupaten/kota	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	√	√		B5	2	2	1	1	1
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	√	√		B5					
				Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	√	√		B5					
S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	INFRADAS PAPUA	Program peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	√	√		B7	2	2	2	2	2
S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN	Penguatan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√	√		B7	2	2	2	2	2
				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√	√		B7					
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	√	√		B7					



Sekian dan Terima Kasih

